

SKRIPSI
BUDAYA POLITIK *WIJA TO GILIRENG* KECAMATAN
GILIRENG KABUPATEN WAJO

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana
Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

ANDI SESSUNGRIWU

E041201049

DAPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024

SKRIPSI
BUDAYA POLITIK *WIJA TO GILIRENG* KECAMATAN
GILIRENG KABUPATEN WAJO

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana
Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

ANDI SESSUNGRIWU

E041201049

DAPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

BUDAYA POLITIK WIJA TO GILIRENG KECAMATAN GILIRENG
KABUPATEN WAJO

Yang diajukan oleh :

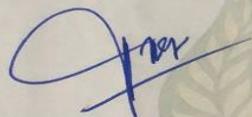
Andi Sessungriwu

E041201049

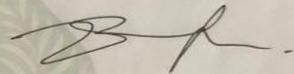
Telah Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Gustiana A. Kambo, S. IP., M. SI.
NIP. 19730813 199802 2 001



Andi Naharuddin, S. IP., M. SI.
NIP. 19731122 200212 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.
NIP. 196921231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

BUDAYA POLITIK WIJA TO GILIRENG KECAMATAN GILIRENG

KABUPATEN WAJO

Disusun dan diajukan oleh :

Andi Sessungriwu

E041201049

Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi

pada Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si. (.....)

Sekretaris : Andi Naharuddin, S. IP., M. Si. (.....)

Anggota : Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D. (.....)

Anggota : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Sessungriwu

NIM : E041201049

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Budaya Politik *Wija To Gilireng* Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 31 Januari 2024



Andi Sessungriwu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan ilmu, inspirasi, kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Budaya Politik *Wija To Gilireng* Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai tantangan akan tetapi semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun material. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar di program studi Ilmu Politik.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik, yang telah memberikan pelayanan

akademik dan administratif tingkat fakultas selama mengikuti perkuliahan.

3. Bapak Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Departemen Program Studi Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif selama mengikuti perkuliahan.
4. Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si. selaku Pembimbing I, yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Andi Naharuddin, S. IP., M. Si. sebagai Pembimbing II yang senantiasa mendorong, mengarahkan dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan benar.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Politik.
7. Seluruh tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.
8. Muhammad Alfati, S.IP., M.Si selaku Camat Kecamatan Gilireng dan sebagai sepupu saya yang telah membantu penelitian saya selama saya ada di Kecamatan Gilireng

9. Almarhum Ayah saya Drs. Andi Sangkuru, M.SI yang telah mendidik saya tentang hal – hal yang baik dan memberi dukungan lewat buku – buku dan catatan yang ditinggalkan untuk membantu penelitian saya.
10. Tiket surgaku, mama saya Andi Nyilitimo S.E yang telah memberi dukungan, dan serta doanya yang tidak pernah putus kepada saya, walaupun telah menjadi single parent tetapi tetap berjuang agar anak -anaknya mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang terbaik.
11. Triza Andini yang selalu setia ada mendampingi, menyemangati, menemani, mensupport, dan memberikan dukungan dalam doa untuk proses penyelesaian skripsi ini.
12. Rezky Amda dan Laode Fathan yang telah menemani saya pergi meneliti di Kecamatan Gilireng
13. Teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) khususnya komisariat Isipol Unhas yang selalu mensupport, memberikan nasehat, doa dan harapan penulis selama penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) khususnya teman – teman dinamis yang selalu menyemangati dan mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

15. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis sadar bahwa terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan karya ilmiah ini, oleh karena itu penulis memohon maaf dan menghargai semua saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari setiap pihak yang membaca skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan-Nya kepada kita semua. Aamiin

Makassar, 31 Januari 2024



Penulis
(Andi Sessungriwu)

ABSTRAK

Andi Sessungriwu, Nomor Induk Mahasiswa E041201049, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun skripsi dengan judul: “**Budaya Politik Wija To Gilireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo**”. Di bawah bimbingan Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si. dan Andi Naharuddin, S. IP., M. Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan orientasi budaya politik *wija to gilireng* terhadap camat yang ada di Kecamatan Gilireng. Orientasi yang ingin didapatkan adalah orientasi kognitif, afektif dan evaluatif.

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dimana tipe penelitian ini memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Teknik analisa datanya yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam memastikan keabsahan data peneliti menguji kredibilitasnya dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun sumber data yang didapatkan peneliti meliputi data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Masyarakat Gilireng memiliki orientasi kognitif yang cukup baik, mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem politik yang ada di sekitar mereka. Orientasi afektif Masyarakat Gilireng cukup tinggi mereka mempunyai sikap peka terhadap sistem politik yang ada. Dan Orientasi Evaluatif Masyarakat Gilireng terhadap budaya politik *wija to gilireng* adalah memberikan harapan dan dukungan agar budayanya terus berkembang dan dijaga. Budaya politik Masyarakat Gilireng dikelompokkan kedalam tipe budaya politik civic culture karena memiliki ciri-ciri budaya politik partisipan seperti pengetahuannya dan sikapnya tinggi terhadap objek – objek politik yang ada disekitar mereka dan orientasi mereka tercampur dengan sikap tradisional

Kata kunci: Wija To Gilireng, Budaya Politik dan Masyarakat Gilireng

ABSTRACT

Andi Sessungriwu, Student Identification Number E041201049, Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis with the title: "**Political Culture Wija To Gilireng Gilireng District, Wajo Regency**". Under the guidance of Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si. and Andi Naharuddin, S. IP., M. Si.

This research aims to describe the orientation of political culture *wija to gilireng* towards the sub-district head in Gilireng Sub-district. The orientations to be obtained are cognitive, affective and evaluative orientations.

This research uses qualitative with descriptive research type, where this type of research provides a clear description of the problems studied based on the experiences experienced by the informants. The data analysis technique is by interview and documentation. In ensuring the validity of the data, researchers test its credibility with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The data sources obtained by researchers include primary data and secondary data.

Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the Gilireng Community has a fairly good cognitive orientation, they have sufficient knowledge about the political system around them. Affective orientation of the Gilireng Community is quite high, they have a sensitive attitude towards the existing political system. And the Evaluative Orientation of the Gilireng Community towards the *wija to gilireng* political culture is to provide hope and support so that the culture continues to develop and be maintained. The political culture of the Gilireng Community is grouped into the type of civic culture political culture because it has the characteristics of a participant political culture such as high knowledge and attitudes towards political objects around them and their orientation is mixed with traditional attitudes.

Keywords: *Wija To Gilireng*, Political Culture, Orientation and gilireng people

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENERIMAAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Budaya Politik.....	10
2.2 Orientasi di Budaya Politik.....	13
2.3 Tipe Budaya Politik	15
2.4 Kerangka Berpikir	20
2.5 Skema Pikir	23

BAB 3 METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Lokasi	24
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian	24
3.3 Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Informan Penelitian.....	28
3.6 Teknik Analisis Data	29
BAB 4 GAMBARAN UMUM LOKASI	32
4.1 Keadaan Geografi.....	32
4.2 Keadaan Penduduk	34
4.3 Gambaran Umum Kecamatan Gilireng dan Budaya Masyarakat Gilireng.....	35
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
5.1 Orientasi Kognitif Masyarakat Gilireng Terhadap Camat Kecamatan Gilireng	44
5.2 Orientasi Afektif Masyarakat Gilireng Terhadap Camat Kecamatan Gilireng.....	49
5.3 Orientasi Evaluatif Masyarakat Gilireng Terhadap Camat Kecamatan Gilireng	52
5.4 Tipe Budaya Politik Masyarakat Gilireng	54
BAB 6 PENUTUP	58
6.1 Kesimpulan.....	58
6.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Luas Desa dan Kelurahan Kecamatan Gilireng	33
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Gilireng.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Gilireng	32
Gambar 4. 2 Kantor Kecamatan Gilireng	36
Gambar 4. 3 Bendungan Gilireng Di Kecamatan Gilireng	38
Gambar 4. 4 Tugu Perjuangan Masyarakat Gilireng	40
Gambar 4. 5 Proses Maccera Arajang	42

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau dan budaya yang berbeda-beda. Komunitasnya juga beragam dan terdiri dari berbagai suku. Hal ini membuat sangat sulit untuk menerapkan demokrasi secara langsung di Indonesia. Pemerintahan yang dibentuk disebut juga pemerintahan perwakilan atau pemerintahan perwakilan karena demokrasi diselenggarakan berdasarkan prinsip keterwakilan. Seluruh warga negara Indonesia berhak memilih dalam pemilihan umum. Di sebagian besar negara demokrasi, pemilihan parlemen dianggap sebagai simbol sekaligus ukuran demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan, kebebasan berekspresi, dan berserikat dinilai cukup mencerminkan partisipasi dan harapan masyarakat.

Masyarakat tidak bisa dipisahkan dari politik, menjadi satu dengan kehidupannya. Kehidupan politik merupakan bagian dari hubungan kehidupan mereka, baik warga negara maupun pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Interaksi tersebut terinternalisasi dalam masyarakat yang pada gilirannya membentuk berbagai pendapat, sikap dan pengetahuan tentang praktik politik sistem politik yang akan menentukan perilaku masyarakat. Sesuai dengan teori Gabriel Almond dan Sidney Verba, kita dapat mengetahui budaya politik suatu masyarakat apabila kita memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilakunya terhadap politik.

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat Pemerintah untuk masyarakat dengan maksud kebaikan bersama. Dalam pembuatan kebijakan, pemerintah lah yang bertugas untuk membuatnya tetapi dengan partisipasi masyarakat. Pemerintah dapat melakukan banyak hal lewat proses pengambilan kebijakan. Pemerintah dapat mengatur konflik yang terjadi di masyarakat dan menata birokrasi untuk melaksanakan konflik tersebut¹. Kebijakan di kecamatan gilireng terpengaruhi oleh adanya budaya politik, karena budaya politik di sana mengharuskan camat yang memimpin kecamatan giliring harus berasal dari keturunan masyarakat gilireng

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum². Partisipasi masyarakat gilireng dalam politik sangat besar karena mereka mempengaruhi kebijakan pemerintah kabupaten/bupati wajo dalam penempatan camat di kecamatan di gilireng. Kebijakan di kecamatan gilireng kabupaten wajo terpengaruhi oleh adanya budaya politik di sana. Terutama kebijakan penempatan atau pemilihan camat yang dibuat oleh Kabupaten Wajo.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke

¹ Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008) hlm. 108

² Prof. Dr. Damsar, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) hlm. 180

generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat³. Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.⁴

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, serta sikap individu terhadap peran yang dapat dimainkan dalam sistem politik. Sistem politik diinternalisasikan ke dalam berbagai bentuk orientasi. Hal ini mencakup: 1) orientasi kognitif, pengetahuan dan kesadaran politik, serta keyakinan terhadap objek politik; 2) Orientasi emosional meliputi perasaan

³ Soerjono, Soekanto. Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 150-151

⁴ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), h. 115.

dan emosi terhadap objek politik atau lembaga politik. 3) orientasi evaluatif. Ini mencakup keputusan dan opini mengenai subjek politik, biasanya mencakup nilai dan standar standar dengan informasi dan sentimen. Orientasi politik yang demikian akan menimbulkan budaya politik yang berbeda.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretariat daerah kabupaten atau kota terhadap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari aparatur sipil negara yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kalurahan bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat dari Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Kecamatan Gilireng merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Wajo. Kecamatan Gilireng berdiri pada tahun 2001 yang awalnya merupakan Desa Gilireng. Nama Gilireng diambil dari kata Bahasa Bugis yaitu *Giling Ko Mu Renreng I Sunge'Mu* yang dalam Bahasa Indonesia berarti Berbaliklah Dengan Semangatmu. Sebelum Indonesia Merdeka pada mula Kecamatan Gilireng merupakan sebuah Kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Gilireng. Raja yang memimpin di sana dinamakan atau bergelar Datuk Gilireng. Kecamatan Gilireng juga biasa disebut *Tanai Gella*. *Tanai Gella* adalah sebuah wilayah yang tidak boleh yang dimasuki adat istiadat dari luar Gilireng. Kecamatan Gilireng mempunyai adat tersendiri itulah mengapa Gilireng menolak adat istiadat dari luar Gilireng. Istilah *Tanai Gella* sudah ada dari Gilireng masih berbentuk kerajaan hinggga menjadi kecamatan.

Budaya politik *Wija To Gilireng* (keturunan orang gilireng) adalah budaya politik yang ada di Masyarakat Gilireng. Masyarakat Gilireng mempunyai kebudayaan dan tradisi yakni pemimpin di daerah mereka harus keturunan Gilireng. Budaya ini muncul karena mereka menyakini bahwa Masyarakat Gilireng akan hancur bila pemimpin mereka bukan berasal dari kelompok mereka. Apalagi karakteristik dari Masyarakat Gilireng adalah jiwa pejuang. Dalam sejarah Masyarakat Gilireng terkenal dengan prajuritnya. Di mana hampir semua Masyarakat Gilireng di didik untuk cuman menjadi pejuang pada zaman kerajaan.

Tipe Masyarakat Gilireng sebenarnya sudah berbaur dengan Masyarakat lain, tetapi Masyarakat Gilireng tetap menjaga budaya dan adatnya. Masyarakat Gilireng mempunyai tokoh adat yang bertugas menjaga adat dan menjalankan adat Gilireng tersebut. Hingga kini Masyarakat Gilireng terkenal di Kabupaten Wajo dengan Masyarakat yang paling menjaga budaya dan adatnya.

Karakteristik politik Masyarakat Gilireng adalah masih menganut sistem politik kerajaan/monarki absolut. Masyarakat Gilireng cuman percaya yang dapat memimpin mereka adalah Datuk Gilireng atau keturunannya tetapi seiring waktu keturunan Datuk Gilireng banyak yang sudah tinggal diluar Sulawesi dan bentuk pemerintahan yang ada di Masyarakat Gilireng berubah menjadi kecamatan. Karakteristik politik Masyarakat gilireng pun agak berubah yaitu yang memimpin atau yang

menjadi camat tidak lagi harus berketurunan Datuk Gilireng tetapi tetap harus yang berketurunan Gilireng.

Dalam beberapa tahun terakhir Kecamatan Gilireng dihadapi masalah yaitu permasalahan camat di Kecamatan Gilireng. Masyarakat Gilireng menolak adanya camat yang bukan berasal dari kelompok mereka yang bernama Muhammad Yusuf camat ke 2 camat Kecamatan Gilireng. Kecamatan Gilireng mengalami konflik dimana yang menjadi Camat Kecamatan Gilireng bukan berasal dari keturunan Gilireng. Konflik terjadi karena ada masyarakat yang meneror kecamatan gilireng dengan melempar bangkai anjing di kantor Kacamatan Gilireng, membakar kantor Kecamatan Gilireng dan merusak mobil dinas. Dari konflik ini lah terjadi lah evaluasi dalam penempatan Camat di Kecamatan Gilireng. Alasan Masyarakat Gilireng membuat konflik tersebut cuman ingin budaya mereka terjaga dan tidak ingin orang lain/orang luar yang memimpin Masyarakat Gilireng tersebut

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka penulis meneliti mengenai budaya politik "*Wija to gilireng*" Kacamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Demikian, semoga dapat memberikan kebermanfaatan bagi pembaca

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

Bagaimana orientasi budaya politik Masyarakat Gilireng terhadap Camat Kecamatan Gilireng ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

Mengetahui tentang orientasi budaya politik *Wija To Gilireng* di Masyarakat Gilireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo terhadap Camat di Kecamatan Gilireng.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas terdapat beberapa manfaat penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan orientasi budaya politik *Wija To Gilireng* Masyarakat Gilireng terhadap camat Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan informasi terkait nilai sosial budaya dengan nilai norma, sikap, dan kepercayaan di Masyarakat Gilireng terkhusus budaya *Wija To Gilireng*

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa kerangka konsep yang relevan dengan judul atau rumusan masalah yang diteliti. Peneliti mencoba menjadikan konsep tersebut sebagai alat analisis tentang budaya politik *Wija To Gilireng* Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Untuk lebih memperjelas maka penulis menggunakan konsep budaya politik untuk melihat budaya politik yang ada di Kecamatan Gilireng. Aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

2.1 Budaya Politik

Budaya adalah hal yang melekat bagi beberapa bagian daerah di Indonesia. Budaya merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi serta untuk mendorong menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya. Budaya dapat dipandang sebagai semua cara hidup yang harus dipelajari, diharapkan, dan sama-sama diikuti serta dipedomani oleh warga masyarakat tertentu. Singkat kata, budaya merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa.

Politik adalah suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang perkaitan dengan warga negara dalam negara⁵. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan

⁵ Prof.Dr.Damsar,Pengantar Sosiologi Politik(Jakarta:Prenadamedia Group,2010) hlm.10

peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis⁶. Di Indonesia budaya masih terjaga dan bercampur dengan hal lain seperti politik. Yang menghasilkan budaya politik tersendiri di beberapa daerah di Indonesia.

Pembangunan kebudayaan adalah langkah strategis pada pengembangan politik bangsa. Lantaran budaya bisa sebagai kontrol terhadap politik. Ketika dalam praktiknya menanggalkan prestise & integritas manusia

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, serta sikap individu terhadap peran yang dapat dimainkan dalam sistem politik. Sistem politik diinternalisasikan ke dalam berbagai bentuk orientasi.

Budaya Politik pada Indonesia mampu dipandang menurut pelaku masyarakatnya. Jadi, pengertiannya yaitu tindakan atau perilaku masyarakat negara pada merespon struktur dan kegiatan politis pada sebuah wilayah. Adapun mengenai budaya politik ini dari menurut aspek eksklusif, misalnya adat, pengetahuan dan kebiasaan rakyat. Hasil pemahaman, pembelajaran juga analisis pada kurun ketika eksklusif sang rakyat yg akhirnya membangun budaya. Sifat budaya yg berkembang pada

⁶ Miriam Budiarodjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 15

rakyat indonesia kini merupakan mixed political culture. Selain memiliki budaya bertipe parokial, jua memegang partisipan.

Pada hakikatnya kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif, dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan-tindakan politik, maka kebudayaan politik selalu menyediakan arah dan orientasi subjektif bagi politik. Karena kebudayaan politik merupakan salah satu aspek dari kehidupan politik, maka jika kita ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu kelompok masyarakat secara bulat dan utuh, maka kitapun dituntut melakukan penelaahan terhadap sisinya yang lain⁷.

Berkaitan dengan sistem politik, kebudayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem. Di samping itu kebudayaan politik lebih mengutamakan dimensi psikologis suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan, atau simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam suatu masyarakat sekaligus harapan-harapannya. Variabel yang ada bisa berawal dari suasana psikologis seseorang, argumentasi umum dalam jajaran psikologis sosial, dan terminal terakhir bertumpu pada suatu sosial-ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai determinan pembentukan orientasi, sikap, dan tingkah laku politik.⁸

⁷ Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 23

⁸ Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 24

Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini terjadi, karena kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antarorientasi dan antar-nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontak antar budaya, dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan pengembangan budaya politik masyarakat⁹.

2.2 Orientasi di Budaya Politik

Orientasi politik merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pilihan. Budaya politik yang berkembang di sebuah negara sangat bergantung pada orientasi atau persepsi politik yang diterima atau dimiliki oleh masyarakatnya.

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba mengungkapkan bahwa “budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain daripada orientasi psikologis terhadap objek sosial. Sistem politik mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat

a. Kognitif

Orientasi Kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala

⁹ Gabriel A. Almond and Bingham Powell, *Comparative Politics A Developmental Approach* dikutip Rusadi Kantraprawira, *Budaya Politik*, h. 42.

kewajibannya serta input dan outputnya. Kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota.

b. Afektif

Orientasi Afektif, adalah perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya. Komponen afektif menyangkut aspek perasaan seorang warga negara. Menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu.

c. Evaluative

Orientasi Evaluatif, adalah keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Menyangkut keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan¹⁰.

Perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan, ketiga komponen ini tidak terpisahkan-pisahkan tetapi saling terkait atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi. Semisal seorang warga negara dalam melakukan penelitian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan

¹⁰ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), hlm. 16

yang memadai tentang si pemimpin. Pengetahuan itu tentu saja sudah dipengaruhi, diwarnai, atau dibentuk oleh perasaannya sendiri. Sebaliknya, pengetahuan orang tersebut tentang sesuatu simbol politik, misalnya, dapat pula membentuk atau mewarnai perasaannya terhadap simbol politik itu. Boleh jadi, pengetahuan tentang suatu simbol sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.

2.3 Tipe Budaya Politik

Almond dan Verba membagi budaya politik dalam tiga jenis, yakni budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek dan budaya politik partisipan. Yang penting dari klasifikasi tersebut adalah kepada objek politik apa aktor politik individual berorientasi, bagaimana mereka mengorientasikan diri, dan apakah objek-objek politik tersebut terlibat secara mendalam di dalam pembuatan kebijaksanaan atau di dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Hasilnya adalah beberapa jenis tiga tipe ideal budaya politik berikut:

a. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial (parochial political culture) adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan fenomena umum yang bisa ditemukan dalam masyarakat – masyarakat yang belum

berkembang, dimana spesialisasi politik sangat minimal. Budaya politik parokial, yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah atau merupakan tipe budaya politik dimana ikatan seorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apapun dari sistem politik. Ini diakibatkan oleh sebab individu tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Individu hanya merasa bahwa mereka terikat dengan kekuasaan yang dekat dengan mereka, misalnya suku mereka, agama mereka, ataupun daerah mereka.

Ciri-ciri budaya politik parokial adalah sebagai berikut:

- a) Pengetahuan tentang sistem politik masih rendah.
- b) Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalam masyarakatnya cenderung rendah.
- c) Warga tidak banyak berharap atau tidak memiliki harapan-harapan tertentu dari sistem politik tempat ia berada

b. Budaya Politik Kaula/Subjek

Budaya politik subjek atau kaula memiliki frekuensi orientasi - orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (input) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (output) sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya

atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Budaya politik subjek/kaula, yaitu budaya politik yang tingkatannya lebih tinggi dari parokial. Dalam budaya ini individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. Individu yang berbudaya politik subjek juga memberi perhatian yang cukup atas politik akan tetapi tidak bangga atasnya, dalam arti, secara emosional mereka tidak merasa terlibat dengan negara mereka. Saat mereka tengah membicarakan masalah politik, cenderung ada perasaan tidak nyaman sebab mereka tidak mempercayai orang lain begitu saja. Saat berhadapan dengan institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Ciri-ciri budaya politik kaula/subjek adalah sebagai berikut:

- a) Warga menyadari sepenuhnya akan otoritas pemerintah.
- b) Tidak banyak warga yang memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, tetapi mereka cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah.
- c) Warga bersikap menerima saja putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi, apalagi ditentang.
- d) Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak mampu berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
- e) Warga menaruh kesadaran, minat dan perhatian terhadap sistem politik pada umumnya dan terutama terhadap objek politik output, sedangkan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah.

c. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah suatu budaya politik dimana para warga masyarakat memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik dan administratif. Dengan perkataan lain, perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sitem politik sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipan masyarakat dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya¹¹. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung

Teori tentang sistem politik yang diajukan oleh David Easton yang kemudian dikembangkan pula oleh Almond, ini mewarnai kajian ilmu politik pada kala itu (1950-1970). Diantara kalangan teoritis dalam ilmu politik yang sangat berperan dalam mengembangkan teori kebudayaan politik adalah Almond dan Verba, ketika keduanya melakukan kajian di lima negara yang kemudian melahirkan buku yang sangat berpengaruh pada 1960 an-1970 an, yaitu *The Civic Culture*. Civic culture inilah yang menurut Almond dan Verba merupakan basis bagi budaya politik yang membentuk demokrasi.

¹¹ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984 (Almond & Verba, 1984)), hlm. 27.

Ciri-ciri budaya politik partisipan adalah sebagai berikut:

- a) Warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya dan mampu mempergunakan hak itu serta menanggung kewajibannya.
- b) Warga tidak menerima begitu saja keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik keseluruhan, input, output maupun posisi dirinya sendiri.
- c) Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik.
- d) Masyarakat menyadari bahwa ia adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.
- e) Kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi, seperti halnya penjual dan pembeli. Warga dapat menerima berdasarkan kesadaran, tetapi juga mampu menolak berdasarkan penilaiannya sendiri.

d. Civic culture

Civic culture adalah tipe budaya campuran partisipan dengan tipe budaya lainnya. Setiap individu menjadi partisipan di kombinasikan dengan dan bukan menggantikan orientasi – orientasi politik parokial dan subjek. Setiap individu menjadi partisipan dalam proses politik, tapi tidak menyerahkan orientasi mereka sebagai subyek ataupun parokial. Lagi pula, bukan hanya orientasi orinetasi yang disebut terdahulu saya

dipertahankan, disamping orientasi orientasi politik partisipan subyek dan parokial,

Orientasi – orientasi politik non partisipan yang tradisional cenderung membatasi komitmen tersebut menjadi lunak. Dalam suatu pengertian, orientasi subyek dan parokial “menata” atau mempertahankan orientasi – orientasi politik partisipan. Oleh sebab itu sikap sesuai dengan partisipasi di dalam politik memegang peranan penting dalam kebudayaan politik, tapi demikian juga dengan sikap – sikap non politik yang sejenis seperti kepercayaan terhadap orang lain dan partisipasi sosial pada umumnya. Pengawatan sikap sikap yang lebih tradisional dan peleburrannya orientasi partisipan menimbulkan kebudayaan politik yang seimbang Dimana aktivitas politik, keterlibatan dan rasionalitas tampil kepermukaan tapi di imbangi dengan tradisionalitas dan kebakuan serta komitmen terhadap nilai-nilai parokial.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan yang hendak dilakukan peneliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam sebuah penelitian

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama

dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari

Masyarakat tidak bisa dipisahkan dari politik, menjadi satu dengan kehidupannya. Kehidupan politik merupakan bagian dari hubungan kehidupan mereka, baik warga negara maupun pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Interaksi tersebut terinternalisasi dalam masyarakat yang pada gilirannya membentuk berbagai pendapat, sikap dan pengetahuan tentang praktik politik sistem politik yang akan menentukan perilaku masyarakat. Sesuai dengan teori Gabriel Almond dan Sidney Verba, kita dapat mengetahui budaya politik suatu masyarakat apabila kita memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilakunya terhadap politik.

Budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain daripada orientasi psikologis terhadap objek sosial. Sistem politik mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif,afektif dan evaluative

Almond dan Verba membagi budaya politik dalam tiga jenis, yakni budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek dan budaya politik partisipan. Yang penting dari klasifikasi tersebut adalah kepada objek politik apa aktor politik individual berorientasi, bagaimana mereka mengorientasikan diri, dan apakah objek-objek politik tersebut terlibat secara mendalam di dalam pembuatan kebijaksanaan atau di dalam pelaksanaan kebijaksanaan

Budaya politik Masyarakat Gilireng kecamatan gilireng mempunyai pengaruh kuat di pemerintah. Karena masyarakat gilireng masih sangat menjaga kebudayaannya. Di mana masyarakat gilireng termasuk masyarakat yang masih menjaga kemurniaan budayanya. Salah satu budaya yang menjadi budaya politiknya ialah soal kepemimpinan. Di mana mereka cuman ingin dipimpin oleh mempunyai identitas sama yaitu etnis Gilireng. Budaya itu diistilahkan dengan "*Wija To Gilireng*".

Budaya politik *Wija To Gilireng* (keturunan orang gilireng) adalah budaya politik yang ada di Masyarakat Gilireng. Masyarakat Gilireng mempunyai kebudayaan dan tradisi yakni pemimpin di daerah mereka harus keturunan Gilireng. Budaya ini muncul karena mereka menyakini bahwa Masyarakat Gilireng akan hancur bila pemimpin mereka bukan berasal dari etnis mereka. Apalagi karakteristik dari Masyarakat Gilireng adalah jiwa pejuang. Dalam sejarah Masyarakat Gilireng terkenal dengan prajuritnya. Di mana hampir semua Masyarakat Gilireng di didik untuk cuman menjadi pejuang pada zaman Kerajaan

2.5 Skema Pikir

